ABSTRAKSI

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran dan analisa terhadap kinerja dan efisiensi sektor publik yang meliputi 38 kabupaten/kota di Jawa Timur terkait dengan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan apakah desentralisasi fiskal di Indonesia berdampak pada meningkatnya kinerja dan efisiensi sektor publik.

Meningkatnya efisiensi merupakan dampak utama yang diharapkan dari desentralisasi fiskal dengan didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah dianggap lebih tahu dan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi daerahnya sendiri dibanding dengan pemerintah pusat.

Penelitian ini melakukan penghitungan indeks kinerja dan efisiensi sektor publik (*public sector performance*, PSP dan *public sector efficiency*, PSE) pada kabupaten/kota di Jawa Timur dengan menggunakan indikator komposit penilaian kinerja yang terdiri dari 6 sub indikator, yaitu administrasi, pendidikan, kesehatan, distribusi, alokasi (kinerja ekonomi) dan stabilitas. Tiga sub indikator pertama adalah indikator sosio-ekonomi, sedangkan tiga sub indikator berikutnya adalah indikator musgravian, yaitu indikator kinerja yang mengacu pada indikator kinerja publik menurut Musgrave.

Free Disposable Hull (FDH) yang merupakan teknik analisis non-parametrik, yang menghasilkan *production possibility frontier* (PPF) digunakan untuk melalukan analisis efisiensi relatif antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Berdasarkan skor efisiensi yang dihasilkan oleh FDH tersebut, dapat dilakukan pemeringkatan (ranking) antar kabupaten/kota di Jawa Timur dalam hal efisiensi belanja publik. Hasil analisis FDH menunjukkan bahwa rata-rata skor efisiensi sektor publik di Jawa Timur pada tahun 2005 lebih rendah dibanding tahun 2004. Berdasarkan temuan dari hasil analisis FDH tersebut, maka penurunan efisiensi sektor publik yang terjadi di Jawa Timur pada 2005 mengindikasikan bahwa ada masalah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja (*non-discretionary input*) yang mempengaruhi efisiensi sektor publik di Jawa Timur, maka digunakan alat analisis *Tobit Periode Fixed Effect Panel Data*. Hasil analisis Tobit menunjukkan bahwa variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia), yang digunakan sebagai proksi untuk mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efisiensi sektor publik. Sementara itu, dengan semakin besar rasio DAU (Dana Alokasi Umum) terhadap belanja daerah suatu daerah, maka ternyata daerah tersebut tidak efisien di dalam mengelola sumber dayanya.

Berdasarkan temuan dari hasil analisis Tobit tersebut, maka kinerja dan efisiensi sektor publik di Jawa Timur ternyata sangat dipengaruhi oleh ukuran-ukuran pembangunan yang bersifat kualitatif atau indikator-indikator pembangunan non-moneter, seperti : indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu sebaiknya tujuan pembangunan di kabupaten/kota di Jawa Timur difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang bersifat kualitatif atau non-moneter.

Kata Kunci : Desentralisasi fiskal, *Public Sector Efficiency (PSE), Public Sector Performance, Free Disposable Hull (FDH), Tobit* .